

## Eksplorasi Beban Digital Guru: Survei Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) oleh Guru<sup>1</sup>

### Exploring Teachers' Digital Workload: A Survey on the Utilization of Platform Merdeka Mengajar (PMM) by Teachers

Iman Zanatul Haeri<sup>2</sup> & Anggi Afriansyah<sup>3</sup>

<sup>2</sup>[imanzanatulhaeri@gmail.com](mailto:imanzanatulhaeri@gmail.com)

Universitas Negeri Jakarta

Jl. Rawangun Muka Raya, Pulo Gadung, Jakarta 13220, Indonesia

<sup>3</sup>[angg017@brin.go.id](mailto:angg017@brin.go.id) (corresponding author)

Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta, Indonesia

Received: October 3, 2024 | Revised: October 20, 2024 | Published: December 31, 2024

**Abstract:** Previous research has identified various challenges in the implementation of the platform Merdeka Mengajar (PMM) among teachers, including limited internet access and technological devices, teachers' proficiency in using technology, limited understanding of PMM, and an increased digital workload that occupies teachers' time. This article aims to: (1) analyze the increase in teachers' digital workload due to extensive digitalization through PMM, (2) identify communication and instructional patterns in PMM implementation, and (3) examine how teachers utilize PMM to provide more effective and humane recommendations for improvement. A survey was conducted using a questionnaire distributed via Google Forms to 211 teachers across 27 provinces in Indonesia. The article highlights three key findings: First, digitalization through the platform Merdeka Mengajar (PMM) significantly increases teachers' workload. A total of 55.9 percent respondents reported teaching 24–30 hours per week, 19 percent taught 30–40 hours, and 4.3 percent taught 40–50 hours. Additionally, 79.1 percent of respondents indicated that PMM increased their administrative burden. Second, communication and instructions related to PMM were found to be hierarchical and lacked dialogue, with 70.1 percent of respondents using PMM due to direct instructions from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) or school management. Third, the digital workload forced 51 percent of respondents to complete PMM tasks outside of school hours, including 22.3 percent working at home and 14.7 percent working late at night. Moreover, a significant portion of respondents relied on personal resources, with 71.1 percent using their own internet and 67.3 percent covering electricity costs to fulfill

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan penyempurnaan dari makalah presentasi berjudul "Survei Beban Digital Guru dalam PMM" yang dipresentasikan di dalam *Forum on Education and Learning Transformation (FELT)* yang diselenggarakan oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 22–23 Juli 2024 di Jakarta.



PMM requirements. This article recommends that the government consider teachers' rights and working hours when implementing PMM.

**Keywords:** administrative burden; digital burden; platform Merdeka Mengajar; teachers; workload

**Abstrak:** Riset terdahulu memaparkan berbagai tantangan dalam operasionalisasi platform Merdeka Mengajar (PMM) di kalangan guru: keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi, kapabilitas guru dalam penguasaan teknologi, pemahaman terbatas mengenai PMM, serta meningkatnya beban digital yang menyita waktu guru. Artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis peningkatan beban digital guru akibat masifnya digitalisasi melalui PMM; kedua, mengidentifikasi pola komunikasi dan instruksi dalam pengerjaan PMM; serta ketiga, meninjau ulang mekanisme pemanfaatan PMM oleh guru untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif dan manusiawi. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarluaskan melalui Google Form kepada 211 guru di 27 provinsi di Indonesia. Tiga temuan utama artikel ini adalah: pertama, digitalisasi melalui PMM secara signifikan meningkatkan beban kerja guru. Sebanyak 55,9 persen responden mengajar 24–30 jam per minggu, 19 persen mengajar 30–40 jam, dan 4,3 persen mengajar 40–50 jam. Sebagian besar responden (79,1 persen) melaporkan bahwa PMM menambah beban administrasi mereka. Kedua, pola komunikasi dan instruksi terkait PMM bersifat hierarkis dan kurang dialogis, dengan 70,1 persen responden menggunakan PMM karena tekanan instruksi langsung dari Kemendikbudristek atau pihak sekolah. Ketiga, beban kerja digital memaksa 51 persen responden mengerjakan tugas PMM di luar jam sekolah dan mengerjakan di rumah (22,3 persen), sering hingga larut malam (14,7 persen), dan sebagian besar menggunakan biaya pribadi untuk internet (71,1 persen) dan listrik (67,3 persen). Artikel ini menyarankan DPR RI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan hak dan jam kerja guru dalam implementasi PMM.

**Kata kunci:** beban administrasi; beban digital; beban kerja; platform Merdeka Mengajar

## Pendahuluan

Platform Merdeka Mengajar (PMM) merupakan media edukasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk para guru Indonesia agar dapat melaksanakan peran secara optimal. PMM dirilis oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, pada tanggal 11 Februari 2022. Platform ini memiliki tujuh fitur utama: pertama, kanal informasi Kurikulum Merdeka (KM); kedua, panduan berbentuk video; ketiga, pelatihan mandiri yang memuat topik-topik KM; keempat, bukti karya sebagai portofolio; kelima, komunitas belajar bagi guru; keenam, asesmen murid; dan ketujuh, perangkat ajar menurut mata pelajaran dan fase (Wahyudin *et al.*, 2024).

Keberadaan platform ini awalnya dianggap membantu para guru dalam memahami KM. Dalam penelitian di SMK Pesantren Temulus, Azhari *et al.* (2024) menyebutkan empat dari tujuh fitur PMM (perangkat ajar, menu kelas, menu pelatihan mandiri, dan menu bukti karya) dapat meningkatkan kompetensi guru dan memfasilitasi pembelajaran siswa. Studi penggunaan PMM di SDN Curahmalang II Sumobito Jombang dengan model *flipped class* dalam pembelajaran menunjukkan PMM mempunyai keunggulan yaitu efisien dan akurasi tinggi (Nurhasanah *et al.*, 2023). Begitu juga guru yang menggunakan PMM untuk membantu mengajarkan untuk siswa kelas VII di UPTD SMPN 19

dianggap meningkatkan kemampuan pemahaman membaca siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris (Hijriani *et al.*, 2024). Bahkan, Soedjono (2023) menyebut PMM dianggap mempunyai efektivitas yang sangat tinggi dari sisi konten dalam meningkatkan kompetensi guru dalam kinerja pembelajarannya. Ditambah, penelitian di SDN 006 Loa Janan menyatakan bahwa sebagian besar guru sudah bisa menggunakan platform ini, sudah ada guru yang menerapkan, dan masuk pada proses tindak lanjut dalam penerapan langsung di dalam kelas (Ramdani *et al.*, 2022). Hal ini diperkuat dengan penelitian di SMP Swasta Katolik St. Aloysius Niki-Niki yang menunjukkan 80 persen gurunya baru mengikuti pelatihan PMM. Meskipun 60 persen guru membutuhkan waktu yang lama untuk menjelajah PMM (Salsinha *et al.*, 2024).

Di sisi lain, selain paparan riset yang menunjukkan sisi positif PMM, terdapat situasi di mana pemanfaatan PMM juga dirasa kompleks dan problematik. Pertama, secara umum manajemen waktu guru dalam mengimplementasikan KM perlu menjadi perhatian (Fauzi, 2023). Pelaksanaan PMM di SDN 1 Melinggih Kelod Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali misalnya, menunjukkan beberapa kendala karena kemampuan guru yang mendekati masa pensiun dalam mengakses dan menerapkan menu PMM serta kesibukan guru karena kewajiban dalam kegiatan adat (Astuti *et al.*, 2023). Menghadapi situasi tersebut, sosialisasi dan pelatihan penggunaan PMM kepada seluruh guru agar implementasi KM dapat berjalan dengan baik dan kinerja serta kompetensi guru dapat meningkat menjadi sangat penting (Sudarsih, 2023). Persoalan sosialisasi juga diungkap dalam penelitian terhadap guru di TK Ceria Pantai Labu Deli Serdang. Permasalahan yang dihadapi para guru sehubungan dengan sosialisasi PMM, yaitu kurangnya pemahaman guru dalam mengaktifkan PMM (Jaya *et al.*, 2023). Untuk mengatasinya Jumarniati dan Fitriani (2023) merekomendasikan pendampingan penggunaan PMM oleh dinas pendidikan.

Kedua, tingkat pemahaman terhadap PMM memang masih menjadi persoalan. Survei terhadap 36 responden dari MGMP Bahasa Inggris di Kota Bengkulu, diperoleh data 25 persen guru masih belum paham dengan PMM dan hanya 14 guru menggunakan PMM dalam pembelajaran. Sebanyak 58,3 persen guru menyatakan perlu adanya pelatihan penggunaan PMM dalam pembelajaran. Selain itu, riset yang dilakukan terhadap 120 orang guru sekolah dasar (SD) yang berada di tiga wilayah (Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Kediri) mengungkap bahwa guru mengalami problematika dalam menyusun aksi nyata. Hal ini tampak dari jumlah sertifikat yang telah diperoleh dari unggah aksi nyata. Persentase jumlah guru yang belum mendapat sertifikat adalah sebesar 66,9 persen atau 79 orang guru. Peringkat kedua adalah guru yang sudah mendapat satu sertifikat sebanyak 15,3 persen atau 18 orang. Hal ini menunjukkan terdapat problematika PMM yang menyebabkan guru tidak berhasil menyusun aksi nyata sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam PMM (Anwar & Utami, 2023).

Ketiga, permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya keterlibatan guru dalam penggunaan PMM. Dari total 1.406.085 guru pengguna PMM, hanya terdapat 671.644 dan 14.082 unggahan terkait dengan rencana pelajaran dan artikel. Selain itu, hanya terdapat 1.439 unggahan terkait video dan aksi nyata yang dilakukan (Ikram *et al.*, 2023). Faktor penyebab rendahnya akses PMM seperti kendala waktu, adanya tuntutan membuat aksi nyata, perlunya konsentrasi, serta masalah kuota dan jaringan terungkap juga dalam studi di SMAN Negeri 6 Surakarta (Ambawani *et al.*, 2023). Masalah kuota dan jaringan terjadi juga di SD di Sumatera Barat. Penelitian tersebut menyebut PMM berperan dalam meningkatkan kompetensi guru di SD tetapi masih terkendala jaringan saat mengaplikasikannya (Lena *et al.*, 2023). Sementara penelitian kualitatif

terhadap Guru Penggerak di SMA/SMK di Jakarta yang menggunakan PMM menunjukkan masalah serupa, seperti kendala waktu dan penggunaan teknologi (Syahriani et al., 2023).

Di era kemajuan teknologi yang semakin masif, Kemendikbudristek mengklaim PMM sebagai platform edukasi dan teman penggerak yang dapat meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik di Indonesia (Anwar & Utami, 2023). Namun, seperti sudah dipaparkan pada berbagai riset terdahulu terdapat berbagai kompleksitas dan problematika dalam pemanfaatannya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kapabilitas guru dalam penguasaan teknologi, akses internet dan perangkat, pemahaman terkait PMM, sosialisasi yang terbatas, keterlibatan guru dalam berkontribusi di PMM, dan meningkatnya beban digital yang menyita waktu guru. Dari berbagai artikel tersebut tampak bahwa beban kerja digital guru meningkat selama pemanfaatan PMM. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi beban digital guru dalam pemanfaatan PMM di ruang pendidikan di Indonesia. Terdapat tiga isu utama yang akan dianalisis untuk menunjukkan berbagai persoalan terkait operasionalisasi PMM oleh guru. Pertama, analisis terhadap peningkatan beban kerja digital guru di tengah masifnya digitalisasi yang diterapkan pemerintah melalui PMM. Apakah meningkatnya beban kerja guru juga membuat kualitas pendidikan semakin meningkat atau membawa implikasi negatif bagi guru? Kedua, identifikasi terkait dengan pola komunikasi dan instruksi dalam proses pengerjaan PMM. Apakah pemerintah sudah melakukan pola komunikasi yang dialogis atau instruksi yang disampaikan masih kurang dipahami oleh guru-guru? Ketiga, tinjauan ulang terhadap pola dan mekanisme pemanfaatan PMM untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas dan praktik pendidikan yang lebih konstruktif dan manusiawi. Bagaimana pola dan mekanisme pemanfaatan PMM yang lebih konstruktif dan manusiawi bagi para guru?

Analisis mendalam mengenai eksplorasi beban digital guru dalam pemanfaatan PMM dapat memberikan manfaat bagi DPR RI. Pertama, melalui temuan survei ini, DPR RI dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas program PMM dalam mengakselerasi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Kedua, analisis dari artikel ini dapat menjadi bahan bagi DPR RI untuk melakukan *check and balances* terhadap program PMM dan memastikan agar program ini sudah berjalan secara optimal dan dapat meningkatkan mutu guru. Ketiga, paparan dan analisis dalam artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi DPR RI mengenai perlunya inovasi teknologi dalam kegiatan pembelajaran di Indonesia, tetapi tetap memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan emosional guru.

Survei beban digital untuk guru dalam PMM melibatkan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada guru. Variabel yang diukur dalam survei adalah pertama, beban kerja seperti jenis-jenis tugas yang dibebankan kepada guru (misalnya, wali kelas dan pembimbing Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5). Kedua, beban digital, aspek digital yang paling membebani (misalnya, sasaran kinerja pegawai (SKP), PMM, *webinar/diklat*). Ketiga, waktu yang dihabiskan (jumlah waktu yang dihabiskan untuk mendokumentasikan atau melakukan aksi nyata). Keempat, dampak penggunaan PMM seperti persepsi guru mengenai dampak penggunaan PMM (misalnya, menambah atau mengurangi beban administrasi).

Desain penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif untuk mengukur dan menganalisis beban digital yang dialami oleh guru dalam penggunaan PMM. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah besar dan memberikan gambaran umum mengenai kondisi yang dialami oleh guru. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari

pertanyaan-pertanyaan terkait dengan data demografis, beban kerja dan beban digital, waktu yang dihabiskan, dan dampak penggunaan PMM. Data demografis berkaitan dengan informasi mengenai nama, satuan pendidikan, wilayah, provinsi, dan status kepegawaian. misal, aparatur sipil negara (ASN) di antaranya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Untuk guru yang bekerja di sekolah negeri tetapi belum memiliki status pegawai disebut guru honorer. Sementara guru yang direkrut langsung oleh pemerintah daerah disebut guru kontrak pemerintah daerah (pemda). Kemudian untuk guru non-ASN yang bekerja di sektor privat biasa disebut sebagai guru swasta yang memiliki dua status, yaitu guru tetap yayasan (GTY) dan guru tidak tetap (GTT). Beban kerja dan beban digital mengidentifikasi beban kerja guru dan aspek-aspek spesifik dari beban digital yang mereka alami (misalnya, SKP, PMM, *webinar*/diklat). Waktu yang dihabiskan dan dampak penggunaan PMM: pertanyaan mengenai waktu yang dihabiskan oleh guru dalam bekerja dan dampak penggunaan PMM dalam pembelajaran. Secara detil pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dapat dilihat di Tabel 1.

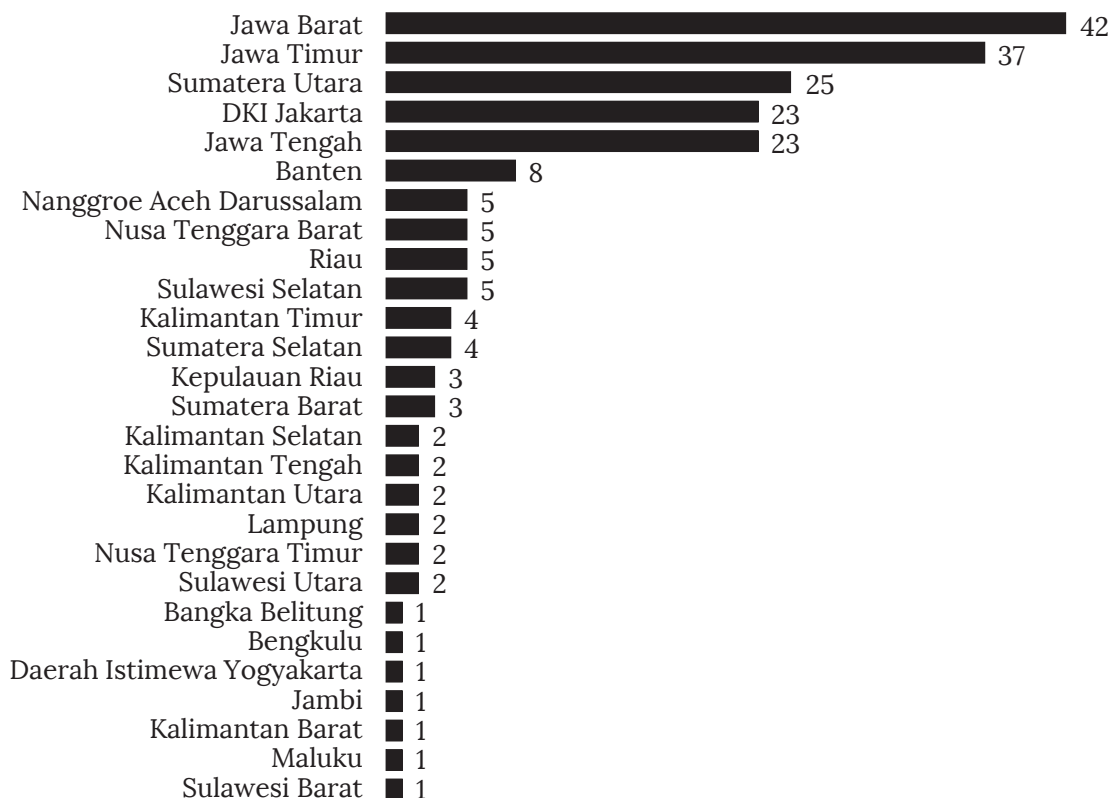
**Tabel 1. Pertanyaan dalam Kuesioner**

Kategori	Deskripsi	Detail
Informasi demografis	Nama, satuan pendidikan, wilayah, provinsi, dan status kepegawaian.	Informasi dasar mengenai identitas dan lokasi kerja guru.
Status kepegawaian	Aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS dan PPPK.	Guru dengan status resmi di bawah pemerintah.
	Guru honorer: guru di sekolah negeri yang belum berstatus pegawai tetap.	Non-ASN di sekolah negeri.
	Guru kontrak pemda: guru direkrut langsung oleh pemda.	Non-ASN di bawah pengelolaan pemda.
	Guru swasta: terdiri dari GTY (guru tetap yayasan) dan GTT (guru tidak tetap).	Guru non-ASN yang bekerja di sektor swasta.
Beban kerja	Identifikasi beban kerja guru secara umum.	Termasuk tugas administratif, pembelajaran, dan tanggung jawab lain.
Beban digital	Aspek spesifik dari beban kerja digital yang dialami guru.	Meliputi penyelesaian SKP, penggunaan PMM, partisipasi dalam <i>webinar</i> /diklat, dll.
Penggunaan PMM	Waktu yang dihabiskan dan dampak dari penggunaan PMM.	Mengukur intensitas pemanfaatan PMM dalam pembelajaran serta efeknya terhadap proses belajar.

Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara daring kepada 211 responden. Jumlah responden yang terbatas dikarenakan tidak semua guru bersedia untuk mengisi kuesioner yang disebarkan. Responden diminta untuk mengisi kuesioner dalam kurun waktu 26 Desember 2023–26 Januari 2024. Meski penulis menyadari ada berbagai kelemahan dalam penggunaan platform daring, penyebaran menggunakan Google Form mempermudah distribusi kuesioner kepada guru di berbagai daerah serta memfasilitasi pengumpulan data yang cepat dan efisien. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran umum mengenai beban digital yang dialami oleh guru. Analisis mencakup distribusi frekuensi, persentase, rata-rata, dan median. Distribusi frekuensi digunakan untuk memahami sebaran jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan. Sementara persentase digunakan untuk mengukur proporsi responden yang mengalami berbagai jenis beban digital. Rata-rata dan median digunakan untuk

mengevaluasi rata-rata waktu yang dihabiskan oleh guru dalam bekerja dan dampak penggunaan PMM. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat beban digital yang dialami oleh guru dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan temuan ini, rekomendasi diberikan untuk mengurangi beban digital dan meningkatkan efektivitas penggunaan PMM. Dengan metode survei ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai beban digital yang dihadapi oleh guru dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan dan implementasi platform digital dalam pendidikan.

Responden dalam penelitian ini mencakup 211 guru dari 27 provinsi di Indonesia yang menggunakan PMM dan mengisi kuesioner yang didistribusikan (Bagan 1). Responden guru yang terlibat dalam survei berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat sebanyak 42 responden (19,9 persen), Jawa Timur sebanyak 37 responden (17,5 persen), DKI Jakarta sebanyak 23 responden (10,9 persen), Jawa Tengah 23 responden (10,9 persen), Sumatera Utara 25 responden (11,8 persen), Provinsi Banten 8 responden (3,8 persen). Lalu, Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Riau, dan Sulawesi Selatan masing-masing 5 responden (2,4 persen). Selanjutnya, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat masing-masing 3 responden (1,4 persen). Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat masing-masing sebanyak 2 responden (0,9 persen) dan Bangka Belitung, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Barat, Maluku, dan Sumatera Barat masing-masing 1 responden (0,5 persen).

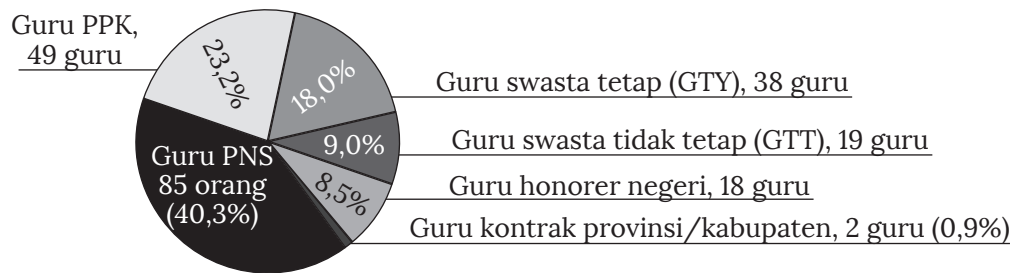


**Bagan 1. Jumlah Responden Penelitian**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Sementara itu responden guru berdasarkan status kepegawaian terdiri dari beberapa kategori, yaitu guru PNS (85 responden/40,3 persen), diikuti oleh guru PPK (49 responden/23,2 persen) dan guru swasta tetap (GTY) (38 responden/18 persen). Selanjutnya, terdapat guru swasta tidak tetap (GTT) (19 responden/9 persen) dan guru

honorer negeri (18 responden/8,5 persen). Jumlah terkecil berasal dari guru kontrak provinsi/kabupaten (2 responden/0,9 persen) (Bagan 2).



**Bagan 2. Status Responden Guru**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

### Beban Kerja Guru di Era Digital: Penelusuran Literatur

Beban kerja guru merupakan masalah yang dialami oleh guru-guru secara internasional (Stacey *et al.*, 2020). Dalam konteks manajemen waktu, kapasitas guru untuk menyampaikan prioritas pendidikan yang mendukung pembelajaran semua siswa dirusak oleh beban kerja yang berat dan intensifikasi kerja yang meningkat (Creagh *et al.*, 2023). Studi Kim (2019) di Korea Selatan menemukan kondisi guru di sekolah negeri memiliki beban kerja administratif yang lebih tinggi sehingga cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu untuk persiapan pengajaran dan memberikan umpan balik pada tugas siswa. Menurut Kim (2019) terdapat situasi di mana guru sekolah negeri menggantikan waktu kerja instruksional dengan pekerjaan administratif. Guru sekolah negeri ditemukan lebih perduli pada tugas administratif yang merupakan kebutuhan administrasi ketimbang tanggung jawab pada kebutuhan orang tua dan siswa (Kim, 2019).

Dalam teori intensifikasi Apple terdapat berbagai kompleksitas dalam pekerjaan guru yang perlu dipahami seperti tentang tuntutan akuntabilitas ataupun kurangnya dukungan sumber daya (Stacey *et al.*, 2020). Dalam konteks global, guru memang semakin menghadapi lingkungan kerja yang semakin kompleks dan menuntut berbagai keterampilan baru (Gavin & McGrath-Champ, 2024). Pandemi Covid-19 telah secara signifikan mengubah cara kerja guru yang biasa dan memberi pergeseran pada pola pendidikan baru yang memberi tekanan pada peningkatan keterampilan dalam penggunaan teknologi baru (Stacey *et al.*, 2024). Studi lain dari Messias dan Loureiro (2023) memaparkan bahwa pascapandemi guru yang memiliki tingkat kompetensi digital dasar atau menengah masih merasa tidak yakin tentang cara menggunakan alat digital secara efektif dan efisien dalam praktik pendidikan mereka. Pandemi Covid-19 secara signifikan mengganggu cara kerja yang biasa bagi para guru, meningkatkan tuntutan kerja melalui peralihan mendadak dalam penyampaian pendidikan dan tekanan untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi baru (Gavin dan McGrath-Champ, 2024).

Kendala guru dalam penggunaan teknologi bukan hanya berasal dari fasilitas yang minim seperti ketiadaan listrik ataupun sinyal. Studi persepsi guru terhadap metaverse di Korea Selatan menunjukkan bahwa hingga kini tidak semua guru menggunakan teknologi metaverse di kelas mereka karena faktor-faktor seperti pemahaman mereka yang terbatas tentang teknologi, keterampilan teknis yang tidak memadai, dan masalah sistem kelembagaan (Jo *et al.*, 2024). Temuan lain menyatakan bahwa terdapat lima faktor (budaya institusi, aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya, tata kelola dan kepemimpinan, kurangnya dukungan teknis dan pedagogis, serta beban kerja yang

berat) yang berkontribusi pada pengembangan kompetensi digital profesional guru pemula (Masoumi & Noroozi, 2023). Berdasarkan temuan tersebut maka dalam transformasi digital perlu diperhatikan lima faktor tersebut agar meminimalisasi persoalan dan dapat meraih tujuan utama dari target yang dituju.

Korhonen *et al.* (2024) dalam konteks Finlandia memaparkan bahwa ketika difasilitasi dengan baik, para guru akan sangat tertarik pada pengembangan lingkungan pembelajaran yang berbasis digital yang memperhatikan aspek pedagogis dan pembelajaran. Minat untuk meningkatkan pembelajaran, pengajaran, dan kolaborasi dalam komunitas kerja dan jaringan juga dapat meningkat dengan adanya digitalisasi (Korhonen *et al.*, 2024). Artinya, selama pemerintah memberikan akses, fasilitas, dan dukungan memadai maka guru-guru dapat memanfaatkan pembelajaran yang mengandalkan berbagai perangkat teknologi. Perhatian pemerintah terhadap ekosistem pendidikan secara keseluruhan dan ekosistem digital pendidikan secara khusus menjadi sangat utama untuk membuat guru berkembang.

Moraiti *et al.* (2024) berpendapat bahwa tugas para guru untuk menunjukkan potensi yang dapat ditawarkan teknologi digital di dalam kelas dan mempromosikan metodologi aktif untuk mendorong kreativitas serta memfasilitasi lingkungan belajar yang menarik. Keahlian guru terletak pada menilai nilai pedagogis dari berbagai teknologi yang digunakan di dalam kelas. Posisi ini menekankan pentingnya penilaian guru tentang teknologi mana yang secara pedagogis tepat untuk digunakan di sekolah (Moraiti *et al.*, 2024). Lebih lanjut Moraiti *et al.* (2024) berpandangan posisi guru sebagai kurator yang menggunakan teknologi untuk memungkinkan tindakan yang secara pedagogis masuk akal. Pada konteks ini, guru berperan untuk mengkurasi dan mengevaluasi pengalaman belajar dan menjadi fasilitator yang dapat memenuhi kualifikasi guru untuk menghadapi realitas yang harus mereka persiapkan.

## Digitalisasi dan Peningkatan Beban Kerja Guru

Bagian ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan pertama, apakah meningkatnya beban kerja guru juga membuat kualitas pendidikan semakin meningkat atau membawa implikasi negatif bagi guru? Jika memperhatikan Tabel 2, sebelum memanfaatkan PMM guru sudah memiliki beban kerja yang beragam.

Tabel 2. Beban Kerja Guru

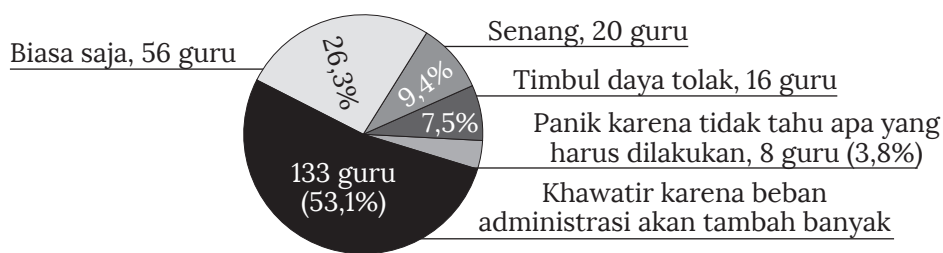
Beban Kerja Guru	Jumlah	Persentase (%)
24–30 jam pelajaran per minggu	118	55,9
30–40 jam pelajaran per minggu	40	19,0
40–50 jam pelajaran per minggu	9	4,3
Di bawah 24 jam pelajaran per minggu	44	20,9
<b>Total</b>	<b>211</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Data menunjukkan bahwa responden guru yang mengajar kurang dari 24 jam pelajaran (JP) sebanyak 44 guru atau 20,7 persen. Responden guru dengan beban ajar 24–30 JP sebanyak 118 guru atau 55,9 persen. Guru dengan beban ajar 30–40 JP sebesar 19 persen atau 40 responden. Sisanya, responden dengan beban mengajar 40–50 JP sebesar 4,3 persen atau 9 guru, dan ini tentu sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Berdasarkan SE GTK 0559/B.B1/GT.02.00/2024 disampaikan bahwa PMM tidak wajib bagi guru non-ASN. Namun, pada saat survei ini dilaksanakan pada 26 Desember 2023 sampai dengan 26 Januari 2024, keluar kebijakan Peraturan Direktur Jende-



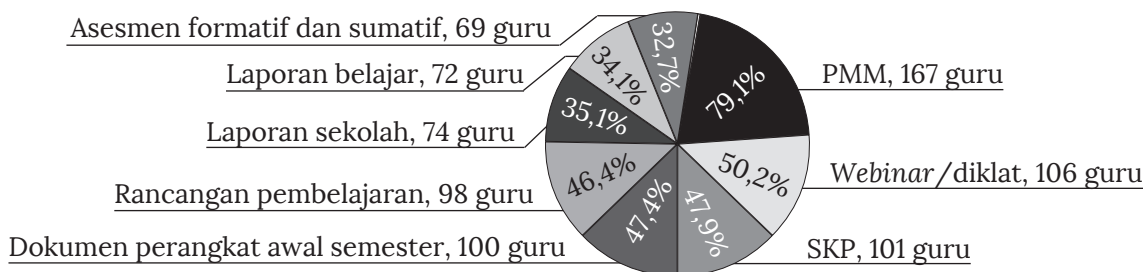
ral Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah yang mewajibkan guru segera membuat perencanaan kinerja melalui PMM. Pada saat kebijakan itu diberlakukan pada 15 Desember 2023, terjadi kepanikan di antara para guru yang terekam dalam survei ini. Dalam pertanyaan “bagaimana responden menerima informasi mengenai pengintegrasian *e-kinerja* atau kewajiban administrasi guru melalui PMM?”, sebanyak 113 responden (53,1 persen) merasa khawatir karena beban administrasi akan bertambah banyak, sementara 56 responden (26,3 persen) menganggap biasa saja, 20 responden (9,4 persen) yang merasa senang, 16 responden (7,5 persen) menunjukkan daya tolak terhadap PMM, dan sebanyak 8 responden (3,8 persen) mengaku panik karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Secara detil dapat dilihat pada Bagan 3.



**Bagan 3. Pandangan Guru terhadap PMM**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Beban kerja guru terus meningkat di tengah masifnya digitalisasi pembelajaran. Bagan 4 menunjukkan bahwa PMM dianggap sebagai beban digital terbesar bagi guru. Pada bagian ini setiap guru dapat mengisi lebih dari satu jawaban. Pilihan jawaban yang disediakan adalah rancangan pembelajaran, laporan belajar, laporan sekolah, SKP, asesmen sumatif dan formatif semester, dokumen perangkat awal semester, PMM, dan *webinar*/diklat. Dari jawaban guru disampaikan beban digital yang paling banyak dipilih adalah PMM (167 responden/79,1 persen). Selanjutnya secara berurutan *webinar*/diklat (106 responden/50,2 persen), SKP (101 responden/47,9 persen), dokumen perangkat awal semester (100 responden/47,4 persen), rancangan pembelajaran (98 responden/46,4 persen), laporan sekolah (74 responden/35,1 persen), laporan belajar (72 responden/34,1 persen), asesmen formatif dan sumatif (69 responden/32,7 persen), dan tidak menjawab (1 responden/0,5 persen).



**Bagan 4. Beban Digital Guru terhadap PMM**

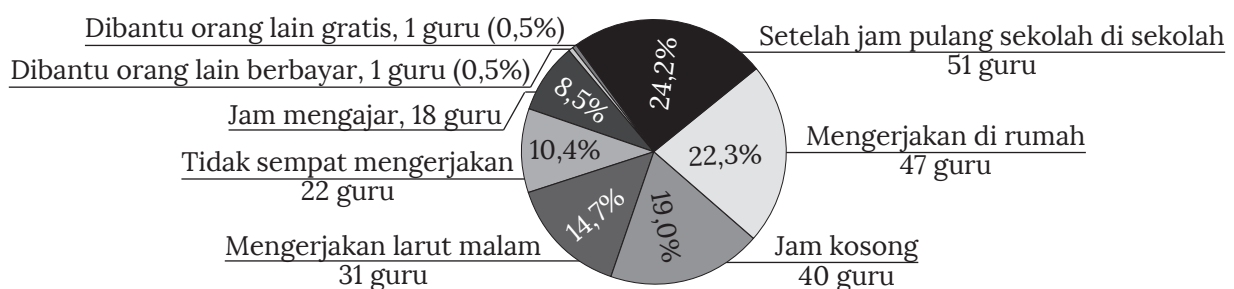
Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Beban administrasi yang terdigitalisasi ini di antaranya adalah laporan digital untuk laporan rancangan pembelajaran, laporan belajar, laporan untuk sekolah, SKP, asesmen sumatif dan formatif, perangkat awal semester, *webinar*, diklat dan pengisian PMM. Beban digital PMM paling tinggi karena platform tersebut menggabung-

kan tiga hal. Pertama, sosialisasi kurikulum berbasiskan bukti digital. Sebagai contoh adalah para guru dituntut untuk menyelesaikan video tontonan mengenai KM yang berjilid-jilid. Setiap satu kali tontonan, guru harus mengisi beberapa soal untuk dinyatakan memahami satuan materi dari KM. Kedua, para guru dituntut untuk melampirkan berbagai jenis bukti digital untuk perencanaan dan perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan laporan pembelajaran. Perencanaan dan perancangan pembelajaran dan laporan pembelajaran berbentuk silabus, RPP, dan beragam media serta metode yang akan digunakan guru dalam mengajar.

Dokumentasi ini biasanya berbentuk dokumen digital seperti dokumen RPP atau bahan tayang materi ajar serta berbentuk audiovisual (video). Dalam pelaksanaan, para guru mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan perangkat-perangkat dan peralatan mengajar dalam bentuk cuplikan gambar dan video. Ketiga, guru ASN melaporkan kinerja mereka, yang tadinya melalui aplikasi dan laman Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemudian diintegrasikan ke dalam PMM.

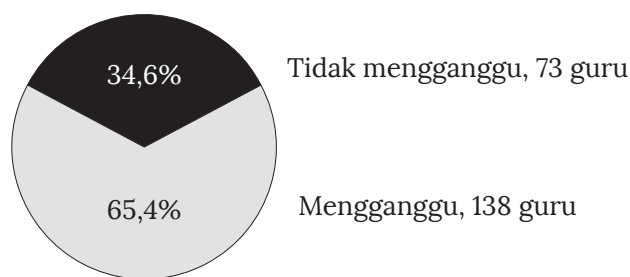
Selanjutnya, untuk mengisi aplikasi PMM, para guru memanfaatkan segala jeda waktu agar memiliki kesempatan mengisi platform tersebut. Dari total 211 responden, 51 responden (24,2 persen) melaporkan mengerjakan tugas PMM setelah jam pulang sekolah di lingkungan sekolah, sementara 47 responden (22,3 persen) menyelesaikannya di rumah. Selain itu, 40 responden (19,0 persen) memanfaatkan jam kosong untuk menyelesaikan tugas PMM, dan 31 responden (14,7 persen) mengerjakannya hingga larut malam. Sebagian guru mengalami keterbatasan waktu, dengan 22 responden (10,4 persen) menyatakan tidak sempat mengerjakan tugas PMM sama sekali dan 18 responden (8,5 persen) harus menyelesaikannya saat jam mengajar berlangsung. Terdapat juga kasus unik, di mana 1 responden (0,5 persen) mengerjakan PMM dengan bantuan orang lain secara berbayar dan 1 responden (0,5 persen) lainnya dibantu secara cuma-cuma. Data ini mengungkap bahwa mayoritas guru harus mengalokasikan waktu tambahan, sering kali di luar jam kerja reguler, untuk memenuhi tuntutan administrasi PMM. Hal ini tidak hanya memengaruhi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, tetapi juga menunjukkan bahwa waktu kerja formal tidak cukup untuk menyelesaikan beban digital yang meningkat.



**Bagan 5. Waktu mengisi PMM oleh Guru**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

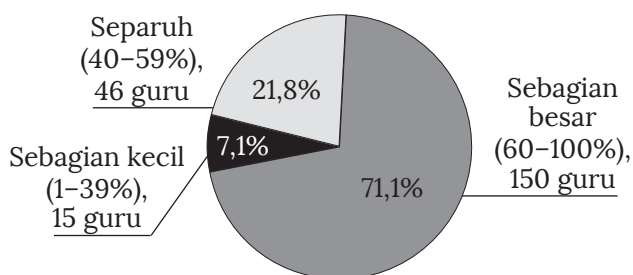
Besarnya beban digital guru dalam mengerjakan PMM sampai menyebabkan mereka mengisinya setelah jam pulang sekolah, di rumah hingga larut malam. Gangguan ini juga disebabkan karena notifikasi yang muncul pada gawai pribadi guru sering kali mengganggu karena berbunyi di luar jam kerja. 138 responden (65,4 persen) mengkonfirmasi bahwa notifikasi PMM muncul di luar jam kerja. Ini tentu saja mengganggu kehidupan pribadi serta ruang privasi guru melalui notifikasi di gawai mereka, seperti diperlihatkan Bagan 6.



**Bagan 6. Gangguan Notifikasi PMM**

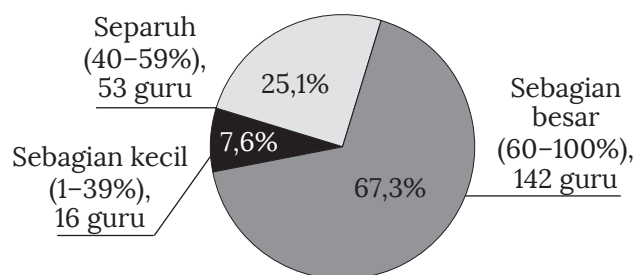
Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

PMM terinstal pada gawai pribadi, maka pembiayaan pulsa dan jaringan internet memang tidak bisa dilepaskan dari pulsa pribadi para guru (Bagan 7). 71,1 persen atau 150 responden mengakses PMM dengan sebagian besar (60–100 persen) pulsa atau Wi-Fi pribadi, 21,8 persen atau 46 responden mengakses PMM sebagian/sepuluh (40–59 persen) dengan pulsa pribadi, dan 7,1 persen atau 15 responden mengakses PMM sebagian kecil (1–39 persen) dengan pulsa atau Wi-Fi pribadi. Selanjutnya, aktivitas PMM dalam gawai pribadi menyebabkan guru menggunakan sumber daya pribadi untuk membiayai proses pengisian PMM, termasuk pada penggunaan listrik pribadi (gambar 8). 67,3 persen atau 142 responden menggunakan PMM dengan listrik pribadi sebagian besar (60–100 persen), 25,1 persen atau 53 responden menggunakannya sebagian (40–59 persen), dan 7,6 persen atau 16 responden menggunakannya sebagian kecil (1–39 persen).



**Bagan 7. Penggunaan Kuota Internet dalam Mengakses PMM**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).



**Bagan 8. Penggunaan Daya Listrik dalam Mengakses PMM**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Memperhatikan data tersebut, apakah meningkatnya beban kerja guru juga membuat kualitas pendidikan semakin meningkat atau membawa implikasi negatif bagi guru? Data menunjukkan bahwa meningkatnya beban kerja guru memiliki kecenderungan membuat posisi guru semakin terjepit ketimbang meningkatnya kualitas pendidikan. Dari data statistik yang sudah dipaparkan, ada beberapa temuan yang perlu diperhatikan. Pertama, perubahan kebijakan menimbulkan kepanikan karena masih ada guru yang kurang mendapatkan informasi. Kedua, beban kerja digital guru meningkat setelah pemberlakuan PMM antara lain membuat laporan pembelajaran, laporan belajar, SKP, kegiatan asesmen, *webinar*, serta diklat. Pada porsi ini guru perlu berfokus untuk mengunggah semua bukti kerjanya melalui PMM. Ketiga, waktu yang dialokasikan di luar waktu mengajar menjadi lebih banyak karena guru perlu mengerjakan berbagai beban administratif tersebut di luar jam sekolah. Para guru memanfaatkan waktu istirahat di sekolah ataupun di rumah bahkan hingga larut malam untuk mengisi PMM, sebab notifikasi PMM sering hadir juga di luar jam kerja. Keempat, beban administrasi guru pun hadir membayangi kehidupan pribadi guru, sehingga sulit

membedakan waktu kerja dan waktu pribadi. Para guru pun harus membiayai secara personal berbagai kebutuhan seperti jaringan internet dan biaya listrik ketika bekerja di rumah.

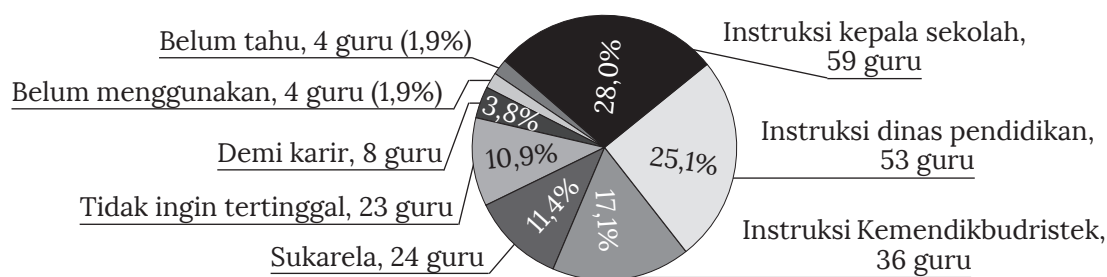
Kerumitan dan beban digital yang hadir dalam bentuk input ragam administrasi melalui PMM telah meningkatkan intensifikasi kerja guru, membuat guru fokus kepada hal tersebut, dan kemudian menegasikan kegiatan inti menemani anak-anak belajar. Fenomena tersebut dapat dengan mudah dijelaskan seperti yang diungkap oleh Gavin dan McGrath-Champ (2024), saat ini secara global terdapat krisis dalam yang menghantui profesi guru. Berbagai penelitian empiris selama satu dekade terakhir menunjukkan intensifikasi kerja, tuntutan beban kerja, dan beban administratif guru yang berefek pada tingginya tingkat stres, kelelahan, sampai ada yang mengundurkan diri dari profesi guru. Yang paling parah dari semua adalah kehilangan waktu yang efektif terkait pekerjaan inti dan paling berharga yaitu mendidik siswa. Dalam kasus PMM, pendampingan terhadap para siswa yang utama (*core*) menjadi tergantikan tugas administrasi. Upaya untuk membangun kapasitas melalui paparan informasi di PMM, juga upaya menunjukkan profesionalitas guru melalui unggahan bukti kerja menjadi beban digital baru bagi guru. Selain itu, terdapat juga kondisi di mana para guru memiliki kesulitan akses internet dan kapabilitas personal dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

Menggunakan bahasa yang berbeda, kasus serupa terjadi di Korea Selatan seperti yang digambarkan oleh Kim (2019) pada risetnya. Kim (2019) menggunakan istilah tugas pengajaran guru dan instruksional yang esensial (*essential teaching and duties*) untuk memperlihatkan tugas-tugas inti yang harus dikerjakan guru. Tugas inti tersebut terkait pendampingan anak-anak di dalam ruang kelas maupun di luar kelas. Dalam riset tersebut, Kim (2019) memaparkan terdapat kecenderungan sekolah-sekolah negeri di Korea Selatan yang lebih cenderung dinilai dari segi pelaporan administratif dan lebih memprioritaskan pekerjaan administratif ketimbang pekerjaan yang esensial, berupa pengajaran di kelas dan pendampingan siswa lainnya. Sementara itu, dalam konteks Australia, para guru juga menghadapi berbagai beban kerja yang semakin besar dan berubah-ubah sifatnya (Stacey *et al.*, 2020). Administrasi dan berbagai pengumpulan data yang harus dilakukan guru menjadi lebih banyak. Guru-guru mendapatkan tantangan untuk memilah pekerjaan-pekerjaan administratif yang menjadi tuntutan (Stacey *et al.*, 2024). Ketika guru menghadapi tuntutan pekerjaan yang tinggi, maka peluang guru mengalami *burnout* sangat tinggi. Kelelahan emosional ini dipengaruhi oleh tekanan waktu (dalam penyelesaian berbagai tugas) dan kemudian berpengaruh pada motivasi dan kesejahteraan guru (Skaalvik & Skaalvik, 2020). Menyimak hasil survei dan dikaitkan dengan berbagai riset terdahulu, semakin menegaskan bahwa hadirnya digitalisasi pendidikan memang meningkatkan beban kerja guru.

## **Membangun Pola Komunikasi yang Dialogis dalam Implementasi PMM**

Apakah pemerintah sudah melakukan pola komunikasi yang dialogis atau instruksi yang masih kurang dipahami oleh guru-guru? Jika memperhatikan data, PMM disosialisasikan dengan cara yang formal dan struktural dan belum pada taraf yang dialogis. Pada pertanyaan bagaimana sosialisasi PMM yang dirasakan para guru, alasannya dapat diperhatikan pada Bagan 9.

Pada 24 November 2023, Harian Kompas menerbitkan wawancara dengan para guru yang berjudul “Saat Guru Berburu Centang Hijau”. Dalam pemberitaan tersebut guru yang diwawancarai mengaku terus dituntut dinas pendidikan agar segera menyelesaikan pelatihan mandiri dan aksi nyata dalam PMM (Napitupulu, 2023). Hal ini



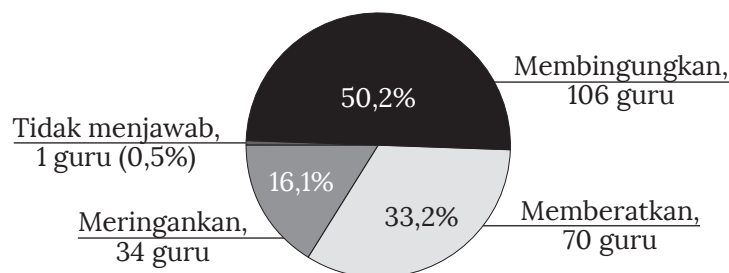
**Bagan 9. Alasan Penggunaan PMM**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

terkonfirmasi dari 211 guru yang menjadi responden terkait pertanyaan penggunaan PMM, 59 guru atau 28 persen menjawab karena instruksi dari kepala sekolah, 53 guru atau 25,1 persen menjawab karena instruksi dari dinas pendidikan, dan 36 guru atau 17,1 persen menggunakan PMM karena instruksi dari Kemendikbudristek. Dapat dilihat, sosialisasi penggunaan PMM secara struktural merupakan instruksi hierarkis dari Kemendikbudristek, dinas pendidikan, dan kepala sekolah. Jika diakumulasikan sebesar 70,1 persen responden guru menggunakan PMM karena instruksi struktural hierarkis dan berjenjang dari institusi-institusi tersebut. Selain itu, 24 guru atau 11,4 persen menggunakan PMM secara sukarela, 24 guru atau 11,4 persen menjawab tidak ingin tertinggal, 8 guru atau 3,8 persen menggunakan PMM demi karir, dan masing-masing 4 guru atau 1,9 persen belum tahu dan belum menggunakan PMM.

Proses pengintegrasian SKP ke PMM diterbitkan melalui Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nomor 7607/b.b1/hk.03/2023 pada tanggal 15 Desember 2023. Sementara sosialisasi pengintegrasian *e-kinerja* guru ke PMM dimulai pada tanggal 25 Desember 2023 pada kanal-kanal resmi Kemendikburistek. Sementara dalam peraturan tersebut para guru maksimal harus membuat perencanaan kinerja paling lambat pada tanggal 30 Januari 2024. Artinya, sosialisasi perubahan platform kinerja guru ke PMM terhadap 2,2 juta guru ASN (PNS dan PPPK) hanya diberi jeda 45 hari (15 Desember 2023–30 Januari 2024). Perubahan mendadak ini menyebabkan guru non-ASN seperti guru swasta dan honorer di sekolah negeri mengikuti berbagai *webinar* yang berkaitan dengan *e-kinerja* dalam PMM. Survei yang dilakukan pada kurun waktu 26 Desember 2023–26 Januari 2024 mampu merekam situasi ini karena respondennya tidak hanya guru ASN.

Dari pertanyaan bagaimana penerapan *e-kinerja* dalam PMM (Bagan 10), 70 responden menjawab penerapan tersebut memberatkan (33,2 persen) dan 106 guru (50,2 persen) menjawab membingungkan. Hanya 34 guru (16,0 persen) yang menjawab meringankan, sementara 1 guru (0,5 persen) tidak menjawab.

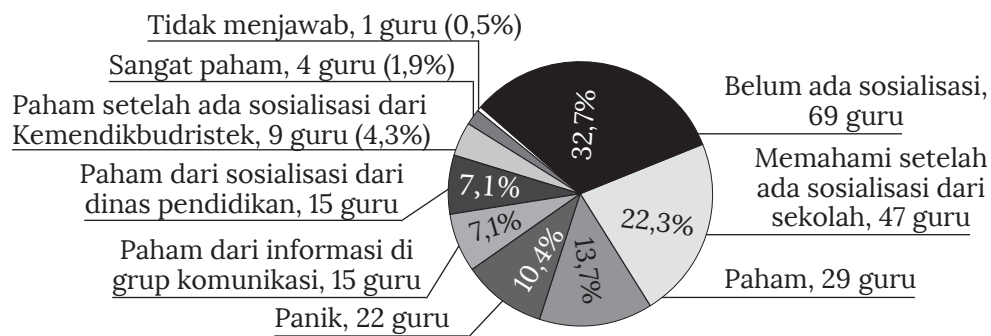


**Bagan 10. Penerapan E-kinerja di PMM**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Jawaban tersebut berkorelasi dengan pertanyaan lain berkaitan dengan bagaimana para guru memahami penerapan integrasi SKP BKN dengan *e-kinerja* di PMM. 69

responden (32,7 persen) menjawab belum mendapat sosialisasi, 47 responden (22,3 persen) memahami setelah ada sosialisasi dari sekolah, 29 responden (13,7 persen) merasa sudah paham, 22 responden (10,4 persen) mengalami panik, 15 responden (7,1 persen) paham dari informasi di grup komunikasi, 15 responden (7,1 persen) paham dari sosialisasi dari dinas pendidikan, 9 responden (4,3 persen) paham setelah ada sosialisasi dari Kemendikbudristek, 4 responden (1,9 persen) merasa sangat paham, dan 1 responden (0,5 persen) tidak menjawab. Dari data ditunjukkan bahwa masih sangat banyak responden yang belum memahami penerapan integrasi SKP BKN dengan e-kinerja di PMM karena tidak terjangkau oleh sosialisasi yang memandai.



**Bagan 11. Penerapan Integrasi SKP BKN dengan E-kinerja di PMM**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Dalam konteks kebijakan, sosialisasi dan dialog dengan para guru menjadi sangat penting untuk menyukseskan kebijakan yang akan diimplementasikan. Komunikasi yang tidak membuka ruang dialog akan sangat membahayakan dan menimbulkan misinterpretasi dalam pelaksanaannya, sehingga terdapat guru yang mengaku tidak memahami bagaimana mengelola PMM. Paparan data menunjukkan sosialisasi PMM belum efektif menjangkau seluruh guru, guru yang terbebani dan bingung dengan berbagai perubahan yang mendadak, dan adanya kebutuhan terhadap metode sosialisasi yang lebih dialogis, inklusif, dan menyeluruh.

Pendidikan sebagai dialog memungkinkan semua pihak melihat lebih jelas apa yang memiliki nilai intrinsik dalam pendidikan dengan menunjukkan sentralitas kebijakan moral dan intelektual dalam kehidupan beradab dan pengajaran yang mendidik (Kazepides, 2010). Lebih lanjut Kazepides (2010) memaparkan bahwa proses dialog membutuhkan rasa hormat, kepercayaan, keterbukaan pikiran dan kemauan untuk mendengarkan, serta menanggalkan bias prasangka. Tujuan dialog bukan untuk memenangkan argumen tetapi memajukan pemahaman yang sama dengan didasarkan pada keyakinan bersama. Memperhatikan data, pemerintah membutuhkan kerja ekstra untuk memberikan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan pendidikan dan mendasarkan pada adanya ruang dialogis di antara berbagai pemangku kepentingan, khususnya bagi guru-guru yang berada pada garda terdepan medan juang pendidikan. Kesepahaman yang diraih melalui dialog yang dilakukan secara dua arah menjadi penting, karena dalam prosesnya terdapat interaksi yang memungkinkan hadirnya saling percaya.

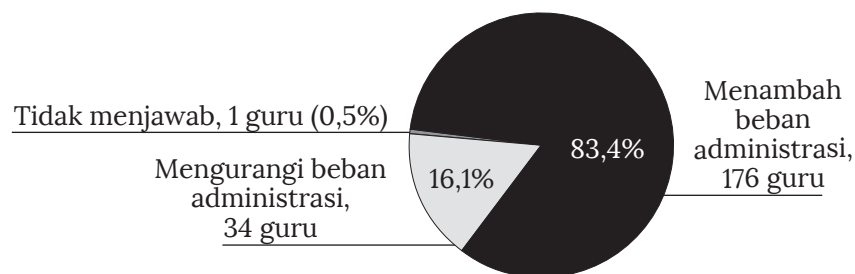
Daya tolak di kalangan guru yang ditemukan dalam survei ini, menunjukkan kurangnya rasa percaya guru pada kebijakan pendidikan, khususnya penerapan PMM. Ini bisa disebabkan karena kurangnya saluran guru dalam memberi masukan atau melakukan klarifikasi secara langsung terhadap penerapan PMM. Ruang dialog yang dibangun memungkinkan berbagai kebingungan atau kegelisahan guru dapat tertangani. Tentu saja hal tersebut menjadikan guru lebih bersemangat dalam menjalan-

kan tugas pendidikan. Proses dialogis dengan guru yang memanfaatkan platform secara langsung sangat penting bagi kebijakan PMM agar terus bisa memperbaharui layanannya. Respons balik dari guru akan membuat kebijakan-kebijakan yang diterapkan menjadi lebih dialogis, inklusif, dan responsif terhadap perubahan. Seperti yang disampaikan oleh Freire (2019), dalam dialog perlu ada harapan dan dialog diperlukan untuk menyadari ada banyak ketidaksempurnaan.

Perbaikan demi perbaikan kebijakan dilakukan melalui dialog antara pembuat kebijakan dan para guru yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di sisi lain rasa kepemilikan dan komitmen terhadap kebijakan pendidikan akan semakin meningkat. Guru menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan tugas-tugas yang dihadapi. Pada proses dialog ini, pihak pemerintah menjadi lebih memahami apa yang merupakan substansi pendidikan atau tugas esensial guru di lapangan pendidikan. Tugas utama para guru menemani peserta didik di dalam dan di luar kelas, bukan perkara administrasi yang berat dan membebani. Tuntutan meningkatkan kualitas, bukan berarti dengan memaksa beban kerja digital yang semakin menjauhkan para guru dari tugas inti atau esensialnya, yaitu mendidik anak-anak bangsa.

### Meninjau Ulang Pemanfaatan PMM

Argumen bahwa PMM melakukan efisiensi dan efektivitas dalam sosialisasi KM, merampingkan beban administrasi, serta meringankan beban kerja guru itu sendiri perlu diuji kembali. Pada pertanyaan apakah PMM (Bagan 12) berdampak dalam mengurangi atau menambah beban administrasi, 176 responden (83,4 persen) menyatakan bahwa penggunaan PMM menambah beban administrasi, 34 responden (16,1 persen) menyebutkan bahwa PMM mengurangi beban administrasi, dan 1 responden (0,5 persen) tidak menjawab.



**Bagan 12. Dampak Penggunaan PMM dalam Administrasi Guru**

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Pada poin ini penggunaan PMM oleh guru perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dari segi aplikasi, perbaikan aplikasi PMM sudah dilakukan, tetapi masih tampak perlunya ada kurasi yang lebih ketat terhadap beragam konten yang ada, selain juga uji kelayakan dan evaluasi terhadap setiap dokumen yang diunggah di PMM. Poin penting lainnya juga perlu adanya pembaharuan dokumen kebijakan yang dapat diakses oleh para guru secara berkala. Perlu dipastikan agar konten yang ada dapat diakses dan sesuai dengan kebutuhan guru. Dari sisi instruksi, pola komunikasi yang mengedepankan dialog perlu diperhatikan. Sosialisasi kebijakan perlu lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan guru, dan juga menangkap aspirasi dari para guru atau pengguna aplikasi. Proses tersebut juga membangun rasa percaya guru karena mereka merasa didengarkan aspirasinya. Selanjutnya, beban kerja digital yang ada pada guru dapat dikurangi porsi dengan membuat skala prioritas yang berbasis pada tugas utama atau esensial guru. Ketika hal tersebut dilakukan, maka guru tidak merasa terbebani

sebab mereka paham yang dilakukan merupakan bagian dari kerja guru. Ketidaktahuan informasi yang didapat oleh guru masih terjadi secara asimetris membuat guru merasa bingung dan panik, yang sebetulnya memiliki biaya psikologis yang besar.

Lalu, bagaimana pola dan mekanisme pemanfaatan PMM yang lebih konstruktif dan manusiawi bagi para guru? Sebagai negara besar yang menjunjung tinggi demokrasi, dialog dalam perumusan kebijakan maupun implementasinya sangatlah penting. Pemanfaatan PMM yang memperhatikan kebutuhan para guru akan membuat kebijakan tersebut menjawab masalah mereka yang dalam keseharian bergelut dengan kondisi pendidikan yang menantang. Dalam konteks lebih lanjut, inklusivitas kebijakan akan membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut membuat implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal karena adanya dukungan dari guru-guru di lapangan pendidikan, termasuk di ruang-ruang kelas. Keterbatasan-keterbatasan yang hadir dalam pemanfaatan PMM akan dapat diatasi jika setiap guru mendapatkan pemahaman yang penuh bahwa PMM dihadirkan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk menambah beban mereka dalam bekerja. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa PMM justru menjadi beban digital baru karena pemerintah tidak memperhatikan pendapat kritis para guru terhadap program tersebut. Kompleksitas dalam ruang pendidikan di Indonesia, termasuk pada kapabilitas guru yang beragam dalam penguasaan teknologi dan ketimpangan akses perlu menjadi perhatian utama dalam meninjau praktikalitas suatu kebijakan pendidikan termasuk pada pemanfaatan PMM. Selwyn *et al.* (2020) memberikan catatan kritis bahwa ketidaksetaraan dalam memanfaatkan teknologi di dalam pendidikan formal maupun informal dan juga bagaimana cepatnya teknologi berubah secara drastis, justru memberikan keuntungan bagi kelompok yang memiliki akses dan sumber daya paling besar.

Jika berkaca pada situasi global yang juga memperlihatkan beban kerja guru yang semakin meningkat (Stacey *et al.*, 2020), maka implementasi PMM perlu memperhatikan kondisi faktual di lapangan pendidikan. Jika menggunakan perspektif yang diajukan oleh Creagh *et al.* (2023) maka yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan PMM adalah terkait dengan manajemen waktu dalam pemanfaatan PMM. Poin utamanya, prioritas pendidikan yang harus didahulukan di tengah intensifikasi kerja yang semakin melesat (Creagh *et al.*, 2023). Studi Kim (2019) tentang kondisi beban guru di sekolah negeri perlu disimak, sebab tampak sekali kesibukan guru untuk menyelesaikan tagihan seperti dalam PMM juga berisiko menjadikan hal tersebut (beban administratif) menjadi utama dan beban mendidik di kelas semakin berkurang. Penambahan beban kerja digital ini dalam pandangan Apple (2020) menjadikan berbagai kompleksitas dalam pekerjaan guru ditambah sehingga guru harus memahami soal akuntabilitas dan dukungan sumber daya. Memperhatikan hasil survei dan berbagai studi yang membahas tentang beban kerja digital guru, tinjauan menyeluruh dari pemerintah terhadap PMM menjadi sangat penting. Ada kekhawatiran bahwa tujuan pendidikan tidak tercapai karena PMM membuat guru-guru sibuk dengan administratif ketimbang perkara substansi pendidikan.

Beberapa hal yang dapat membantu meningkatkan efektivitas PMM dengan mempertimbangkan beban kerja dan kesejahteraan guru. Pertama, PMM terbukti telah menambah beban digital para guru. Untuk memanfaatkan PMM secara efektif, diperlukan keseimbangan antara beban kerja yang sudah ada seperti beban jam kerja melebihi 24 JP. Selain itu diperlukan efisiensi beban digital guru yang benar-benar memperhatikan beban yang sudah dimiliki oleh para guru. Artinya, PMM akan sangat efektif digunakan oleh para guru dengan beban kerja di bawah 24 JP. Pemerintah dapat



menjadikan PMM sebagai alat integrasi berbagai kegiatan berbasis digital sehingga guru dapat mengorganisir beban digital menjadi lebih baik. Selain itu, diperlukan fitur perhitungan tatap layar dalam akses PMM sehingga guru bisa menggunakan PMM melalui gawai secara wajar.

Kedua, kebijakan instruktif dari level pusat, daerah, hingga satuan pendidikan yang menekan guru untuk mengakses PMM perlu diperlonggar dengan cara meniadakan mekanisme kejar target yang membuat guru menjadikannya tuntutan. Meski sampai saat ini tidak ditemukan bukti tertulis kewajiban untuk mengisi PMM, tetapi di lapangan para guru terus mengalami instruksi ganda dari Kemendikbudistek, dinas pendidikan, cabang dinas pendidikan, dan satuan pendidikan. Berbagai pihak yang mengawasi capaian PMM perlu melakukan pendekatan yang lebih humanis dan mementingkan tujuan utama dari PMM untuk membantu guru, bukan sebaliknya. Perlu adanya evaluasi terhadap seberapa besar tuntutan penyelesaian modul dan berbagai input pada PMM berpengaruh kepada peningkatan kinerja dan inovasi guru.

Ketiga, kekhawatiran para guru pada PMM yang ditemukan menunjukkan adanya proses sosialisasi yang kurang dialogis sehingga para guru menghadapi PMM dengan daya tolak. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sosialisasi yang adaptif dengan dua pendekatan, yakni sosialisasi secara tatap muka langsung dan tatap maya yang seimbang. Setiap kebijakan akan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan ketika pemerintah menggunakan pendekatan yang empati dan memberi kesempatan bagi guru untuk memahami esensi dan nilai kebijakan yang akan diterapkan.

Keempat, pemerintah perlu meningkatkan afirmasi pada guru dan sekolah di daerah sulit listrik dan sinyal. Hal ini bisa dalam bentuk pengurangan beban digital dan tuntutan-tuntutan dalam PMM. Misal dengan menyesuaikan himbauan perlunya membuat aksi nyata serta memberikan keleluasaan waktu dalam mengisi SKP bagi guru ASN. Hal ini agar guru dapat melakukan pengisian secara berkala saat yang bersangkutan sedang berada di daerah cukup sinyal dan listrik.

Kelima, pemerintah perlu memperbaiki PMM dengan memperhatikan kritik, saran, dan keluhan para guru terhadap PMM. Pada PMM perlu disediakan kolom kritik dan saran dengan jendela tampilan yang mudah diakses. Kolom kritik dan saran perlu disertai informasi bahwa keluhan yang disampaikan tidak akan mengganggu karier guru yang bersangkutan, sehingga para guru merasa aman memberikan kritik dan saran pada PMM. Memperhatikan kritik, saran, dan keluhan adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mengadopsi pola komunikasi yang lebih dialogis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan nyata para guru. Dialog memungkinkan pembuat kebijakan memahami realitas di lapangan sekaligus membangun rasa percaya dan komitmen bersama. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat diterima dengan lebih baik, dan para guru merasa lebih didukung dalam menjalankan tugas utama mereka, yaitu mendidik generasi penerus bangsa.

## Penutup

Artikel ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, meningkatnya beban kerja guru memiliki kecenderungan membuat posisi guru semakin terjepit dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dari hasil analisis, terjadi peningkatan beban kerja guru di era digital di masa kini. Beban kerja yang bertambah akibat digitalisasi administrasi semakin menekan guru, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Kedua, pola komunikasi pemerintah dalam implementasi PMM cenderung hierarkis, instruktif, dan belum dialogis. Sosialisasi yang bersifat formal dan menggunakan pendekatan struktural ini gagal menjangkau seluruh guru. Kurangnya dialog dan komunikasi yang mema-

dai mengurangi efektivitas dalam implementasi berbagai kebijakan pemerintah. Ketiga, penggunaan PMM dalam mendukung administrasi dan sosialisasi KM masih menghadapi tantangan signifikan. Klaim efisiensi dan efektivitas PMM perlu diuji kembali secara kritis melalui evaluasi yang lebih mendalam. Selain itu, pola komunikasi yang hierarkis dan kurang memperhatikan ruang dialog dapat memperburuk situasi dan membuat kebingungan dan tekanan psikologis bagi guru. Ketimpangan akses teknologi dan kapabilitas yang beragam semakin memperparah kompleksitas dalam pemanfaatan PMM. Meskipun pemerintah telah melakukan pembaruan pada aplikasi, masih diperlukan kurasi konten yang lebih relevan, penyediaan dokumen kebijakan yang terbaru, serta skala prioritas administratif berbasis tugas utama guru sebagai pendidik.

Dalam implementasi PMM penting untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh para guru dalam keseharian mereka. DPR RI perlu mengawasi program digitalisasi pendidikan untuk memastikan produk pendidikan yang dihasilkan telah melalui proses partisipasi yang bermakna. DPR RI perlu melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan berbasis platform digital termasuk PMM. DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk menghilangkan kebijakan instruktif dari level pusat, daerah, hingga satuan pendidikan yang menekan guru dalam mengakses PMM. DPR RI perlu mendorong pemerintah melakukan kajian dan evaluasi terhadap PMM berbasis pengalaman pengguna (*user experience*) dalam hal ini guru. DPR RI perlu mendesak pemerintah agar memberikan capaian kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh PMM. Selain itu DPR RI juga perlu memastikan bahwa PMM menjadi wahana belajar guru, bukan platform yang menjadi beban bagi guru. Ke depan, DPR RI perlu memastikan bahwa berbagai platform yang dibuat pemerintah kepada guru tidak menjadi beban baru.

Pada riset ini tentu ada banyak limitasi baik secara metodologis (pengumpulan data, sampel, waktu penelitian, wilayah, dan lain sebagainya) maupun analisis yang dipaparkan. Dibutuhkan riset yang memiliki pendekatan lebih komprehensif untuk dapat melakukan telaah yang lebih menyeluruh, sehingga dapat memberikan *evidence based* bagi kebijakan pendidikan di Indonesia secara lebih presisi dan holistik.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Pengurus Pusat P2G terutama Satriwan Salim (Koordinator Nasional) dan Feriyansyah (Kabid Litbang Pendidikan P2G) serta para anggota atas kerja sama dalam diskusi dan penyebaran kuesioner untuk pengumpulan data. Penulis juga berterima kasih atas partisipasi para guru yang sudah mengisi kuesioner. Ucapan khusus terima kasih penulis sampaikan untuk editor dan *reviewer* yang sudah memberikan telaah dan masukan untuk manuskrip kami.

## Daftar Pustaka

- Ambawani, C. S. L., Kusuma, T. M. M., Utama, & Sumardjoko, B. (2023). Faktor penyebab rendahnya akses platform Merdeka Mengajar (PMM). *Journal of Education Research*, 4(4), 1880–1892. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.532>
- Anwar, C., & Utami, R. P. (2023). Analisis problematika guru dalam membuat aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2). <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i2.385>
- Astuti, N. P. E., Arnyana, I. B. P., Dantes, I. N., & Wirawan, I. P. H. (2023). “Santi Sarma” implementasi kebijakan penggunaan platform Merdeka Mengajar menuju guru produktif dan inovatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 196–209. <http://dx.doi.org/10.23969/jp.v8i1.7569>

- Azhari, H. K., Tyas, Z. W. R., & Hikmawati, H. (2024). Pemanfaatan aplikasi Merdeka Mengajar dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran*, 4(1), 519–533. <https://doi.org/10.51574/jrip.v4i1.1254>
- Creagh, S., Thompson, G., Mockler, N., Stacey, M., & Hogan, A. (2023). Workload, work intensification and time poverty for teachers and school leaders: A systematic research synthesis. *Educational Review*. Routledge. <https://doi.org/10.1080/00131911.2023.2196607>
- Fauzi, M. N. (2023). Problematika guru mengimplementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada pembelajaran PAI di sekolah dasar. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(4), 1661. <https://doi.org/10.35931/am.v7i4.2688>
- Freire, P. (2019). Education as a practice of freedom. In J. N. Green, V. Langland, & L. M. Schwarcz (Eds.), *The Brazil reader: History, culture, and politic* (2nd ed., pp. 396–398). <https://doi.org/10.1215/9780822371793>
- Gavin, M., & McGrath-Champ, S. (2024). Teacher workload and the organisation of work: A research agenda for a post-pandemic future. *Labour and Industry*, 34(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/10301763.2024.2357891>
- Hijriani, Amaludin, & Larekeng, S. H. (2024). The effectiveness of Merdeka Mengajar platform towards the learning of English reading comprehension as the implementation of independent curriculum at UPTD SMPN 19 Barru Hijriani. *JELITA: Journal of English Language Teaching and Literature*, 5(1), 65–80. <https://doi.org/10.56185/jelita.v5i1.450>
- Ikram, F. Z., Anaguna, N., & Rosidah. (2023). The impacts of real action features in the Merdeka Mengajar platform (PMM): Mathematics teacher's perspective. *MaPan*, 11(2), 202–222. <https://doi.org/10.24252/mapan.2023v11n2a1>
- Jaya, S., T. Van, Purba, S., & Purba, S. (2023). Improving teacher competence using independent teaching application completing learning content based on ICT in Ceria Pantai Labu Kindergarten. *Journal of Education and Teaching Learning (JETL)*, 5(1), 101–110. <https://doi.org/10.51178/jetl.v5i1.1068>
- Jo, M. K., Kim, S. Y., & Yun, Y. (2024). A study on teacher perception of Korean language classes using metaverse: Focusing on the change in perception of teachers before and after metaverse education. *The Korean Association of General Education*, 18(2), 23–42. <https://doi.org/10.46392/kjge.2024.18.2.23>
- Jumarniati, & Fitriani. (2023). Optimizing the freedom teaching platform application (PMM) through the cluster PAUD learning community. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Masyarakat, IPMAS*, 3(1), 51–59. <https://doi.org/10.54065/ipmas.3.1.2023.295>
- Kazepides, T. (2010). *Education as dialogue: Its prerequisites and its enemies*. McGill-Queen's University Press.
- Kim, K. N. (2019). Teachers' administrative workload crowding out instructional activities. *Asia Pacific Journal of Education*, 39(1), 31–49. <https://doi.org/10.1080/02188791.2019.1572592>
- Korhonen, T., Karme, S., Airaksinen, J., Laakso, N., & Salo, L. (2024). Finnish teachers' experiences with transformative digital agency. *Cogent Education*, 11(1), 2402683. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2402683>
- Lena, M. S., Nisa, S., Putri, O. K., & Husna, R. H. (2023). Penggunaan platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah dasar. *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(3), 177–185. <https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1816>
- Messias, I. & Loureiro, A. (2023). Digital open educational resources: teachers' perceptions of the pedagogical implications. *Educational Media International*, 60(3-4), 154–168. <https://doi.org/10.1080/09523987.2023.2324589>

- Masoumi, D. & Noroozi, O. (2023). Developing early career teachers' professional digital competence: A systematic literature review. *European journal of teacher education*, 1–23. <https://doi.org/10.1080/02619768.2023.2229006>
- Moraiti, K., Bergviken Rensfeldt, A., & Lundin, M. (2024). Digital platform work reinforcing performativity: Teacher responses to work intensification explored through trace ethnography. *Critical Studies in Education*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/17508487.2024.2409661>
- Napitupulu, E. (2023, November 24). Saat guru memburu “centang hijau.” *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/24/kegelisahan-guru-saat-dikejar-kejar-harus-dapat-centang-hijau>
- Nurhasanah, Dafik, & Prastiti, T. D. (2023). The summary of flipped classroom learning activities assisted by Merdeka Mengajar platform in improving students' numeracy skills in solving fraction problems. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 4(3), 527–534. <https://doi.org/10.54660/ijmrge.2023.4.3.527-534>
- Ramdani, M., Yuliyanti, S. Y., Rahmatulloh, I. T., & Suratman, S. (2022). Penggunaan platform Merdeka Mengajar (PMM) pada guru sekolah dasar. *Journal of Instructional and Development Researches*, 2(6), 248–254. <https://doi.org/10.53621/jider.v2i6.201>
- Salsinha, C. N., Bete, H., Bone, D., Solo, P. M. M. F. V., Nifu, M. M., Kasa, A. R., & Timutang, M. (2024). Optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar sebagai sarana penguatan kompetensi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 588–597. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1290>
- Selwyn, N., Hillman, T., Eynon, R., Ferreira, G., Knox, J., Macgilchrist, F., & Sancho-Gil, J. M. (2019). What's next for ed-tech? Critical hopes and concerns for the 2020s. *Learning, Media and Technology*, 45(1), 1–6. <https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1694945>
- Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2020). Teacher burnout: Relations between dimensions of burnout, perceived school context, job satisfaction, and motivation for teaching. A longitudinal study. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 26(7–8), 602–616. <https://doi.org/10.1080/13540602.2021.1913404>
- Soedjono, S. (2023). The effectiveness of the independent teaching platform (PMM) in increasing the competency of primary and secondary education teachers. *International Journal of Research in Education*, 3(2), 255–259. <https://doi.org/10.26877/ijre.v3i2.17246>
- Stacey, M., Gavin, M., Fitzgerald, S., McGrath-Champ, S., & Wilson, R. (2024). Reducing teachers' workload or deskilling 'core' work? Analysis of a policy response to teacher workload demands. *Discourse*, 45(2), 187–199. <https://doi.org/10.1080/01596306.2023.2271856>
- Stacey, M., Wilson, R., & McGrath-Champ, S. (2020). Triage in teaching: The nature and impact of workload in schools. *Asia Pacific Journal of Education*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/02188791.2020.1777938>
- Sudarsih, S. (2023). Analysis of the need for using the independent teaching platform to improve teacher performance in schools. *FINGER: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 2(3), 95–101. <https://doi.org/10.58723/finger.v2i3.146>
- Syahriani, Purwanto, A., & Budi, S. (2023). Problems of moving teachers in using independent teaching platforms as a tool for environmental education in schools. *Edumaspul Jurnal Pendidikan*, 7(2).
- Wahyudin, D., Subkhan, E., Malik, A., Hakim, Moh. A., Sudiapermana, E., Alhapip, L., Anggraena, Y., Maisura, R., Amalia, N. R. A. S., Solihin, L., Ali, N. B. V., & Krisna, F. N. (2024). *Kajian akademik Kurikulum Merdeka*. BSKAP Kemendikbudristek.